

# **PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, PENGENDALIAN INTERN AKUNTANSI, DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KEANDALAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH PADA SKPD PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**Muhammad Azlan<sup>1</sup>  
Titiek Herwanti<sup>2</sup>  
Endar Pituringsih<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur  
<sup>2</sup>Program Magister Akuntansi Universitas Mataram

***Abstract:** This study aimed to analyze the influence of the quality of human resources, utilization of information technology, accounting internal control, and financial over sight of there liability of the region's financial statement presentation area on the SKPD East Lombok regency government. Data is collected using a question naire. Analysis to olusedis multiple linear regression with SPSS 16. The population in this study is SKPD located in East Lombok to taling 30 SKPD and each SKPD represented by three members, namely the secretary/head of division, head of the division of finance, and treasurer as respondents. The results showed that the variable quality of human resources, information technology utilization, internal control accounting and financial control regions positive effect on there liability of financial statement presentation SKPD East Lombok regency government. Implications of the study the oretically usability stand point of financial reporting quality information, this research may provide in sight into the decision use fulness so as to provide an explanatory theory on the concept of thinking about the importance of the quality of the resulting financial statements are implicated in increasing the financial accountability of the government. Such understanding is required so that the data presented in the financial statements to be useful and used as best as possible for the user in making the right decision.*

***Keywords:** human resource qualities, information technology utilization, the controlling intern accountancy, local financial monitoring, reliability*

Era globalisasi saat ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh seluruh masyarakat dunia. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia memiliki kewajiban untuk terus-menerus berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). *Good governance* didefinisikan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang sejalan dengan prinsip demokrasi, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik dan administratif, pelaksanaan disiplin anggaran, serta

penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2004:18).

Kepemerintahan yang baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Partisipasi diartikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Sementara akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas

setiap aktivitas yang dilakukan (Mardiasmo, 2004: 18).

Perwujudan *good governance* memerlukan perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralistis, yaitu pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Paradigma baru tersebut menuntut suatu sistem yang mampu mengurangi ketergantungan bahkan menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, serta memberdayakan daerah agar mampu berkompetisi baik secara regional, nasional, maupun internasional.

Perwujudan *good governance* tersebut terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah memerlukan reformasi pengelolaan keuangan daerah dan reformasi keuangan negara. Peraturan perundangan yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004.

Laporan keuangan pemerintah merupakan komponen penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan kepada publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen di instansi pemerintah untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi dalam laporan keuangan (Mardiasmo, 2004: 159). Fungsi informasi dalam laporan keuangan tidak akan memiliki manfaat jika penyajian dan penyampaian informasi keuangan tersebut tidak andal. Keandalan informasi laporan keuangan merupakan wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan publik dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang merupakan unsur nilai informasi penting terkait dengan pengambilan keputusan berbagai pihak.

Kualitas Informasi dalam pembuatan laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang bekerja dengan baik dalam penyusunan laporan keuangan. Sumber daya manusia yang berkualitas ditambah pemanfaatan teknologi informasi yang tepat diharapkan dapat membantu dan memperlancar proses keandalan pelaporan keuangan daerah. Dengan demikian, laporan keuangan yang baik dan berkualitas dapat dihasilkan. Selain itu, pengendalian internal yang efektif dan efisien juga diperlukan.

Teknologi informasi selain teknologi komputer untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi (Indriasari dan Nahartyo, 2008). Keseluruhan aktivitas organisasi pemerintah akan terlaksana apabila dilakukan secara integral dengan pengendalian sesuai peraturan yang berlaku. Berdasarkan PP No. 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Sistem Pengendalian Intern harus diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar tujuan organisasi tercapai.

Hal lain yang mungkin mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah pengawasan keuangan daerah. Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan, untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan dalam rangka menjamin bahwa sumber data organisasi atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi atau pemerintah.

Teori keagenan juga menyatakan bahwa agen bersikap oportunistik dan cenderung tidak menyukai resiko. Tanggung jawab yang ditunjukkan pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif tidak hanya berupa penyajian laporan keuangan yang lengkap dan wajar, tetapi juga bagaimana pemerintah mampu membuka akses untuk para pengguna laporan keuangan. Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur sebagai agen akan menghindari resiko berupa ketidakpercayaan *stakeholders* terhadap kinerja. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan berusaha untuk menunjukkan bahwa kinerja selama ini baik dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah yang harus dibuktikan dengan penyajian laporan keuangan yang andal.

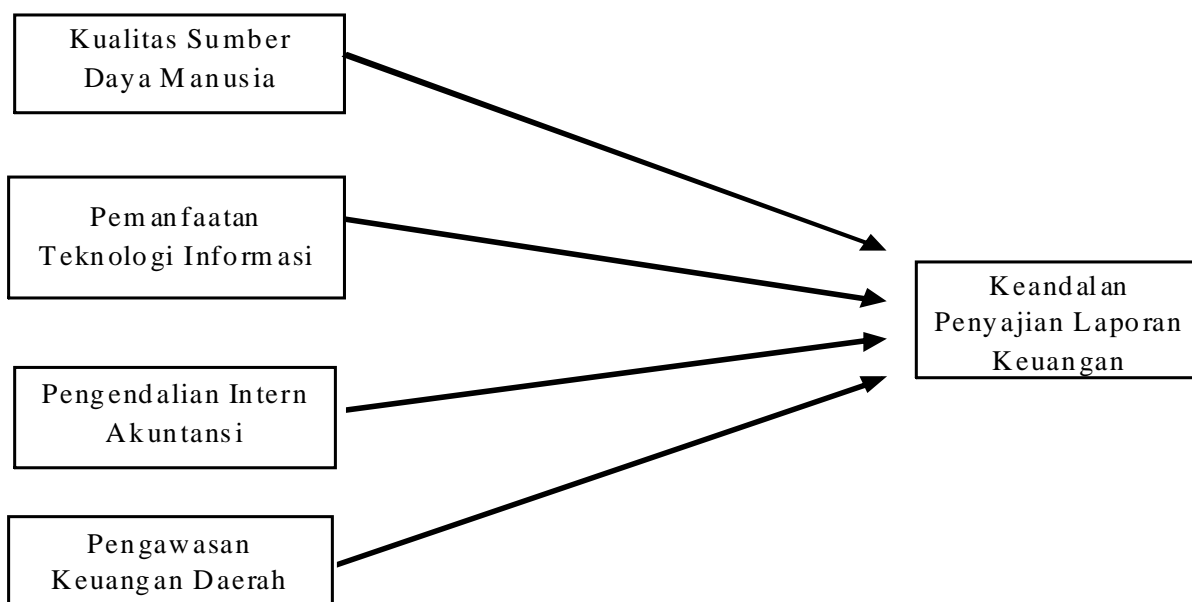
Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Indriasari dan Nahartyo (2008), Arfianti (2011), Ariesta (2013), Sembiring (2013), Marda (2013), dan Sari dan Witono (2014). Penelitian-penelitian tersebut membahas faktor yang berpengaruh terhadap keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Rata-rata penelitian tersebut menggunakan 3 (tiga) variabel. Pada penelitian ini, fokus penelitian diarahkan pada faktor yang berpengaruh terhadap keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dengan

menggunakan 4 (empat) variabel, yang merupakan variabel gabungan dari penelitian sebelumnya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi, pengawasan keuangan daerah terhadap keandalan penyajian laporan keuangan pada SKPD di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Lombok Timur.

## RERANGKA KONSEPTUAL DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Rerangka Konseptual

Berdasarkan tujuan penelitian dan landasan teori yang dibangun, rerangka konsep penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. Rerangka Konseptual Penelitian

### Pengembangan Hipotesis

#### Pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap Keandalan Penyajian Laporan Keuangan pada SKPD Pemerintahan Kabupaten Lombok Timur

Penelitian mengenai pengaruh Sumber Daya Manusia telah dilakukan oleh Indriasari dan Nahartyo (2008), Ariesta (2013), Sembiring (2013), Marda (2013), Sari dan Witono (2014), menemukan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keandalan laporan keuangan. Hasil penelitian tersebut tidak konsisten dengan hasil penelitian Arfianti (2011) yang menemukan bahwa SDM tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keandalan laporan keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut, diduga terdapat hubungan positif antara kualitas SDM dengan keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah sehingga hubungan tersebut di hipotesiskan.

$H_1$  : Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keandalan penyajian laporan keuangan pada SKPD di lingkup Pemerintahan Kabupaten Lombok Timur.

#### Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keandalan Penyajian Laporan Keuangan pada SKPD Pemerintahan Kabupaten Lombok Timur

Pemanfaatan teknologi informasi akan mengurangi kesalahan yang terjadi. Penelitian Indriasari

dan Nahartyo (2008), Arfianti (2011), Ariesta (2013), Sembiring (2013), Sari dan Witono (2014), menemukan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keandalan laporan keuangan. Sementara itu, penelitian Marda (2013), menemukan PTI tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, hubungan tersebut di hipotesiskan.

$H_2$  : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keandalan penyajian laporan keuangan pada SKPD di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Lombok Timur

## Pengaruh Pengendalian Intern terhadap Keandalan penyajian Laporan Keuangan pada SKPD Pemerintahan Kabupaten Lombok Timur

Penelitian Indriasari dan Nahartyo (2008), Arfianti (2011), Ariesta (2013), Sembiring (2013), Sari dan Witono (2014), menemukan bahwa Pengendalian intern (PI) berpengaruh signifikan terhadap keandalan laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, diduga terdapat hubungan positif antara sistem pengendalian intern dengan keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, hubungan tersebut dihipotesiskan.

$H_3$  : Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap keandalan penyajian laporan keuangan pada SKPD di lingkup Pemerintahan Kabupaten Lombok Timur.

## Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Keandalan Penyajian Laporan Keuangan pada SKPD Pemerintahan Kabupaten Lombok Timur

Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal diarahkan antara lain untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Penelitian Marda (2013) menunjukkan Pengawasan Keuangan (PK) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keandalan laporan keuangan. Hasil penelitian tersebut tidak konsisten dengan hasil penelitian Arfianti (2011), di mana PK tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keandalan laporan keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut, diduga terdapat hubungan positif antara pengawasan keuangan daerah dengan keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, hubungan tersebut dihipotesiskan.

$H_4$  : Pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

## METODE PENELITIAN

### Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada SKPD Kabupaten Lombok Timur. Pemilihan responden dilakukan secara

*purposive*. *Purposive sampling* digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti (Sekaran, 2003). Responden dalam penelitian ini adalah para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/tata usaha keuangan pada SKPD Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang berjumlah 30 SKPD.

### Variabel Penelitian

Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah keandalan laporan keuangan yang didefinisikan sebagai kemampuan informasi untuk memberikan keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid.

Variabel independen (X) dalam penelitian ini adalah: (a) Kualitas SDM (X1). Kualitas SDM ini diukur dari kemampuan pengetahuannya (*knowledge*). (b) Pemanfaatan TI (X2). Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur pemanfaatan teknologi informasi adalah *software* aplikasi, proses akuntansi secara komputerisasi, *software* sesuai peraturan perundangan, laporan akuntansi dan manajerial yang terintegrasi, pemeliharaan peralatan, perbaikan peralatan yang rusak/*using*, serta terdapat antivirus. (c) Pengendalian intern akuntansi (X3). Indikator yang digunakan untuk mengukur Pengendalian intern akuntansi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP), pemisahan wewenang, dokumen dan catatan yang memadai, tindakan disiplin atas pelanggaran, pembatasan akses, serta langkah-langkah pencegahan kerusakan. (d) Pengawasan keuangan daerah (X4). Indikator yang digunakan dalam pengawasan keuangan daerah adalah pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, evaluasi kegiatan, pencatatan transaksi berdasarkan bukti, pencatatan transaksi yang tepat waktu, dokumentasi bukti transaksi, sistem pengawasan pelaksanaan tugas, serta laporan keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.

### Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei dengan mendatangi staf sub bagian akuntansi/penatausahaan keuangan pada SKPD di lingkup Kabupaten Lombok Timur serta meminta bantuan kepada sampel untuk mengisi kuesioner yang tersedia.

## Prosedur Analisis Data

### Uji Kualitas Data

Uji terhadap kualitas data penelitian dilakukan dengan melakukan uji validitas dan reliabilitas. Validitas dihitung setiap butirnya dengan melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan total skor konstruk atau variabel (Ghozali, 2006:52). Sementara, reliabilitas instrumen penelitian diuji dengan menggunakan rumus koefisien *cronbach's alpha*. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha* > 0,60 (Nunnally, 1967 dalam Ghozali, 2006:42).

### Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik yang digunakan adalah uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas. Adapun kriteria pengambilan keputusan terhadap masing-masing uji asumsi klasik tersebut sebagai berikut: (1) Pengujian terjadinya multikolinearitas dengan melihat nilai *tolerance* < 0,10 atau sama dengan nilai *VIF* > 10 (Ghozali, 2013:106). (2) Pendeteksian ada atau tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan uji *glejser* dengan membandingkan nilai signifikan masing-masing variabel lebih besar dari derajat kepercayaan yang telah ditentukan (5%). (3) Pendeteksian normalitas dilakukan dengan uji *kolmogorov smirnov* dengan kriteria apabila nilai signifikan uji *kolmogorov smirnov* lebih besar dari 0,05 dapat dinyatakan bahwa residual data berdistribusi normal.

### Model Analisis Data

Pengujian hipotesis dilakukan secara multivariat dengan menggunakan regresi berganda. Model regresi berganda yang digunakan untuk menguji hipotesis sebagai berikut.

$$Y = a + b_1.X_1 + b_2.X_2 + b_3.X_3 + b_4.X_4 + e$$

Di mana:

Y	= Keandalan pelaporan keuangan
a	= konstanta
b <sub>1</sub> ,b <sub>2</sub> ,b <sub>3</sub> ,b <sub>4</sub>	= koefisien regresi
X <sub>1</sub>	= Kualitas sumber daya manusia
X <sub>2</sub>	= Pemanfaatan teknologi informasi
X <sub>3</sub>	= Pengendalian intern akuntansi
X <sub>4</sub>	= Pengawasan keuangan daerah
e	= <i>standarderror</i>

### Pengujian Hipotesis

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara

individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 ( $\alpha=5\%$ ). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut: (1) Jika nilai signifikansi  $t > 0,05$ , maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. (2) Jika nilai signifikansi  $t \leq 0,05$ , maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian

Uji validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis korelasi pearson melalui aplikasi SPSS 16. Uji validitas dilakukan dengan melihat  $r_{tabel}$ . Nilai  $r_{tabel}$  dicari pada signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi dan jumlah data ( $n$ ) = 90, maka didapat  $r_{tabel}$  sebesar 0,30. Nilai  $r_{tabel}$  yang diperoleh dibandingkan dengan nilai  $r_{hitung}$  untuk menguji validitas dari data yang diperoleh dengan menggunakan kuesioner. Hasil uji validitas untuk instrumen Sumber Daya Manusia (SDM), pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi, dan pengawasan keuangan daerah dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semua pertanyaan dinyatakan valid, karena  $r_{hitung} > r_{tabel}$ . Sementara, hasil uji reliabilitas dengan melihat nilai *cronbach alpha*, di mana seluruh variabel memiliki nilai *cronbach alpha* yang lebih besar dari 0,6 menunjukkan bahwa seluruh instrumen variabel penelitian dapat dinyatakan reliabel.

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Adapun hasil penelitian ini apakah data berdistribusi normal ataukah tidak dapat dilihat dari tabel 1.

Berdasarkan tabel 1, hasil uji normalitas yang diperlihatkan oleh nilai kolmogorov-smirnov adalah lebih besar dari taraf signifikansi (>0,05). Hal tersebut menunjukkan bahwa bahwa asumsi normalitas telah terpenuhi pada kedua periode.

#### Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi terdapat korelasi antara variabel bebas. Berikut hasil uji multikolonieritas.

**Tabel 1. Hasil Uji Normalitas**

	X1	X2	X3	X4	Y
Kolmogorov-Smirnov Z	1.159	1.317	1.266	1.217	1.297
Asymp. Sig. (2-tailed)	.136	.062	.081	.103	.069

Sumber: Lampiran 7

**Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas**

	Model	Collinearity Statistics		ket
		Tolerance	VIF	
1	(Constant)			
	X1	.881	1.135	Tidak ada multikolinearitas
	X2	.873	1.145	Tidak ada multikolinearitas
	X3	.917	1.091	Tidak ada multikolinearitas
	X4	.890	1.124	Tidak ada multikolinearitas

Sumber: Lampiran 7

Hasil pengujian multikolinearitas seperti terlihat pada tabel di atas memberikan nilai *tolerance* lebih dari 0,10. Artinya, tidak terdapat gejala multikolinearitas pada model dalam penelitian ini.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Berikut adalah hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

**Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

	Model	t	Sig.	Keterangan
1	(Constant)	.340	.735	Tidak terjadi heteroskedastisitas
	X1	.350	.727	Tidak terjadi heteroskedastisitas
	X2	-.500	.618	Tidak terjadi heteroskedastisitas
	X3	-1.682	.096	Tidak terjadi heteroskedastisitas
	X4	-.356	.723	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Lampiran 7

Berdasarkan tabel 3, tidak ada variabel bebas yang mempunyai signifikansi di bawah 0,05 terhadap logaritma kuadrat residual. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gangguan heteroskedastisitas pada model penelitian.

### Pengujian Hipotesis

#### Uji Koefisien Determinasi (Uji Statistik R<sup>2</sup>)

Hasil pengujian yang dilakukan dengan aplikasi SPSS.21 terhadap data hasil penelitian menunjukkan informasi seperti ditampilkan pada tabel berikut.

**Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi (Uji Statistik R<sup>2</sup>)**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.616 <sup>a</sup>	.379	.350	.37811

a. Predictors: (Constant), X4, X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan hasil uji statistik seperti terlihat pada tabel di atas, nilai koefisien determinasi sebesar 35%. Kondisi ini menunjukkan bahwa variasi variabel

dependen, yaitu keandalan laporan keuangan dapat dijelaskan oleh variabel independen, yaitu kualitas SDM, pemanfaatan TI, pengendalian intern akuntansi, dan pengawasan keuangan daerah, sebesar 30%. Sementara, sisanya sebesar 70% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diikutkan dalam model.

#### Uji Signifikan Parameter Simultan (Uji Statistik F)

Hasil perhitungan uji statistik F dengan menggunakan program SPSS 16 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5. Hasil Uji Statistik F ANOVA<sup>a</sup>**

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	7.419	4	1.855	12.973	.000 <sup>b</sup>
	Residual	12.152	85	.143		
	<b>Total</b>	<b>19.751</b>	<b>89</b>			

a. *Dependent Variable: Y*

b. *Predictors: (Constant), X4, X3, X2, X1*

Sumber: Lampiran 6

Berdasarkan tabel ANOVA di atas, besarnya nilai  $F_{hitung}$  adalah 12,973 dengan tingkat signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama, semua variabel independen yang terdiri atas kualitas SDM, pemanfaatan TI, pengendalian intern akuntansi, dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap keandalan laporan keuangan. Kondisi ini didukung dengan tingkat signifikansi yang jauh lebih kecil dari derajat kepercayaan yang telah ditentukan ( $0,000 < 0,05$ ).

### Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Hasil uji statistik t dengan menggunakan program SPSS 16 dapat dilihat pada tabel.

**Tabel 6. Hasil Uji Statistik t Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.217	.525		.414	.680
	X1	.088	.042	.191	2.093	.039
	X2	.310	.087	.325	3.552	.001
	X3	.167	.056	.266	2.980	.004
	X4	.217	.090	.219	2.421	.018

a. *Dependent Variable: Y*

Sumber: Data Primer diolah

Berdasarkan data pada tabel di atas, keempat variabel independen yaitu kualitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi, dan pengawasan keuangan daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen yaitu keandalan laporan keuangan.

## Pembahasan

### Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Keandalan Laporan Keuangan

SFAC No. 2 tentang *Qualitative Characteristics of Accounting Information* menggambarkan

hirarki dari kualitas informasi akuntansi dalam bentuk kualitas primer, kandungannya, dan kualitas sekunder. Kualitas primer dari informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi adalah nilai relevan (*relevance*) dan reliabilitas (*reliability*). FASB menyatakan bahwa nilai relevan dan reliabilitas adalah dua kualitas utama yang membuat informasi akuntansi berguna dalam pengambilan keputusan. Kualitas informasi akuntansi yang relevan dan andal tentunya dapat diwujudkan apabila sumber daya manusia yang menyediakan informasi tersebut berkualitas. Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Apabila sumber

daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi tidak memiliki kualitas yang disyaratkan, hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi akan terjadi. Akhirnya, informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi, kualitasnya menjadi buruk.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama, kualitas sumber daya manusia yang berperan dalam penyajian laporan keuangan memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap keandalan laporan keuangan. Semakin berkualitas seorang aparatur, yang dilihat dari sisi latar belakang pendidikan, mengerti peran dan tanggungjawab, mengikuti pelatihan keahlian terkait tugas, akan meningkatkan keandalan

laporan keuangan yang disajikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Indriasari dan Nahartyo (2008), Andriani (2010), Wansyah, dkk. (2012), Marda (2013), serta Sari dan Witono (2014), yang menemukan bahwa sumber daya manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keandalan laporan keuangan.

### **Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keandalan Laporan Keuangan**

SFAC No. 2 tentang *Qualitative Characteristics of Accounting Information* menggambarkan hirarki dari kualitas informasi akuntansi dalam bentuk kualitas primer, kandungannya, dan kualitas sekunder. Kualitas primer dari informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi adalah nilai relevan (*relevance*) dan reliabilitas (*reliability*). FASB menyatakan bahwa nilai relevan dan reliabilitas adalah dua kualitas utama yang membuat informasi akuntansi berguna dalam pengambilan keputusan. Keandalan informasi laporan keuangan yang dihasilkan dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk memudahkan penyelesaian pekerjaan. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan memanfaatkan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat.

Hasil uji hipotesis kedua dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keandalan penyajian laporan keuangan. Berdasarkan kondisi yang dapat diamati dilapangan serta jawaban responden terhadap item pertanyaan kuesioner terkait pemanfaatan teknologi informasi, setiap unit kerja yang berada di Kabupaten Lombok Timur telah didukung dengan sarana teknologi informasi yang memadai dari sisi *software* dan jaringan komunikasi. *Software* akuntansi yang dimiliki oleh

pemerintah daerah telah disesuaikan demi memenuhi tuntutan pelaksanaan akuntansi berbasis *accrual* dengan aplikasi Simda Keuangan *Accrual*. Akan tetapi, sumber daya manusia yang mengelola sarana tersebut tidak memiliki kualitas dari sisi pendidikan dan pelatihan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya penggunaan teknologi informasi yang telah disediakan. Hal ini menjadi salah satu penyebab Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memperoleh opini wajar dengan pengecualian sampai pemeriksaan tahun 2015. Temuan ini sejalan dengan penelitian Indriasari dan Nahartyo (2008), Andriani (2010), Wansyah, dkk. (2012), Karmila, dkk. (2013), serta Sari dan Witono (2014), yang menemukan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keandalan laporan keuangan.

### **Pengaruh Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Keandalan Laporan Keuangan**

SFAC No. 2 tentang *Qualitative Characteristics of Accounting Information* menggambarkan hirarki dari kualitas informasi akuntansi dalam bentuk kualitas primer, kandungannya, dan kualitas sekunder. Kualitas primer dari informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi adalah nilai relevan (*relevance*) dan reliabilitas (*reliability*). FASB menyatakan bahwa nilai relevan dan reliabilitas adalah dua kualitas utama yang membuat informasi akuntansi berguna dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan PP No. 60/2008 Pasal 1 (1) tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) disebutkan bahwa sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian internal menekankan pada tindakan pencegahan untuk mengurangi kekeliruan (tidak sengaja) dan ketidakberesan (sengaja) sehingga pelaporan keuangan daerah dapat memenuhi nilai keandalan karena laporan keuangan yang dihasilkan benar dan valid.

Berdasarkan hasil uji atas hipotesis 3 dalam penelitian ini, terdapat pengaruh positif dan signifikan pengendalian intern akuntansi terhadap keandalan penyajian laporan keuangan. Pemerintah daerah telah mengeluarkan regulasi yang menjadi turunan



atas regulasi di atasnya dalam rangka pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah. Regulasi tersebut berbentuk peraturan bupati sebagai acuan dalam pengelolaan keuangan daerah. Regulasi tersebut telah menjelaskan secara rinci standar-standar yang harus diikuti agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi yang relevan dan andal. Akan tetapi pada kenyataannya, regulasi tersebut sampai penelitian ini selesai dilaksanakan, masih belum dijalankan dengan sepenuhnya. Masih kentalnya *nuansa politik* di daerah menyebabkan regulasi yang telah disusun kerap kali dilanggar oleh para aparatur pengelola keuangan. Kondisi ini ditunjukkan dengan banyaknya responden yang menyatakan ketidaksetujuannya atas sistem yang berjalan selama ini dari item pertanyaan dalam kuesioner penelitian ini. Hal ini mengakibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur belum dapat memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari aparat pemeriksa eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Indriasari dan Nahartyo (2008), Wansyah, dkk (2012), serta Sari dan Witono (2014), yang menemukan bahwa Pengendalian intern (PI) berpengaruh signifikan terhadap keandalan laporan keuangan.

### **Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Keandalan Laporan Keuangan**

SFAC No. 2 tentang *Qualitative Characteristics of Accounting Information* menggambarkan hirarki dari kualitas informasi akuntansi dalam bentuk kualitas primer, kandungannya, dan kualitas sekunder. Kualitas primer dari informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi adalah nilai relevan (*relevance*) dan reliabilitas (*reliability*). FASB menyatakan bahwa nilai relevan dan reliabilitas adalah dua kualitas utama yang membuat informasi akuntansi berguna dalam pengambilan keputusan. Informasi keuangan yang relevan dan reliabel tersebut dapat terwujud apabila dilakukan pengawasan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan tersebut. Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan, untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja actual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan dalam rangka menjamin bahwa sumber data organisasi atau pemerintahan

telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi atau pemerintahan.

Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal diarahkan antara lain untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis 4 dalam penelitian ini, terdapat pengaruh positif dan signifikan pengawasan keuangan daerah terhadap keandalan penyajian laporan keuangan. Pengawasan keuangan daerah yang dilakukan baik oleh aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) maupun oleh aparat pengawas eksternal (BPK) sangat diperlukan untuk meminimalisir terjadinya Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Dengan pengawasan keuangan daerah, upaya evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan daerah dari pencatatan transaksi, uji validitas bukti transaksi, pendokumentasian bukti transaksi yang nantinya akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan, akan dilakukan. Pengawasan keuangan daerah merupakan hal pokok yang menjadi perhatian pada Kabupaten Lombok Timur karena sampai saat ini hal tersebut masih dipandang belum memadai dan belum sesuai dengan apa yang dicita-citakan, yaitu memperoleh opini WTP dari BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Marda (2013), yang menemukan bahwa Pengawasan Keuangan (PK) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keandalan laporan keuangan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini berhasil menemukan bukti adanya pengaruh positif variabel kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi, dan pengawasan keuangan daerah terhadap keandalan laporan keuangan. Artinya, peningkatan keempat variabel tersebut akan meningkatkan keandalan informasi laporan keuangan SKPD di Lombok Timur.

### **Implikasi**

Dari sudut pandang kegunaan informasi laporan keuangan yang berkualitas, penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai *decision usefulness theory* sehingga dapat memberikan penjelasan atas konsep berfikir mengenai pentingnya kualitas laporan

keuangan yang dihasilkan. Hal ini berimplikasi pada peningkatan akuntabilitas keuangan pemerintah. Pemahaman seperti ini diperlukan agar data yang disajikan dalam laporan keuangan dapat berguna dan dimanfaatkan sebaik mungkin bagi para pemakai untuk pengambilan keputusan.

Secara praktis, hasil temuan ini dapat digunakan pemerintah daerah untuk evaluasi kedepan terkait dengan faktor-faktor yang harus dikembangkan oleh pemerintah daerah dalam penyajian laporan keuangan yang andal. Demikian pula secara kebijakan, hasil penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran tentang hal-hal yang perlu dikembangkan guna mempertahankan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah, sesuai dengan apa yang diharapkan, yaitu menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang handal dan akuntabel agar bisa mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari auditor eksternal (BPK). Selanjutnya, untuk pengelolaan sumber daya manusia khususnya di bagian penyusunan laporan keuangan agar terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Penetapan peraturan mengenai *rolling* staf dan mutasi pejabat yang menyusun laporan keuangan kiranya perlu diatur tersendiri dengan pertimbangan tertentu. Selanjutnya, untuk memberi motivasi bagi pegawai yang menyusun laporan keuangan perlu diberikan *reward* dan *punishment* agar memberikan kontribusi yang maksimal.

### Keterbatasan dan Saran

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah: (1) Ruang lingkup penelitian ini hanya dilakukan pada satuan kerja pemerintah daerah di wilayah Lombok Timur, sehingga generalisasi hasil temuan dan rekomendasi penelitian ini kurang dapat diberlakukan bagi daerah di luar wilayah Lombok Timur. (2) Penelitian ini masih belum mengeksplorasi variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan yang disajikan khususnya oleh pemerintah daerah.

Saran yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah: (1) Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan hasil penelitian dengan menambahkan obyek penelitian tidak hanya pada lingkup SKPD Lombok Timur, akan tetapi mencakup SKPD yang ada di Nusa Tenggara Barat. (2) Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan variabel penelitian, tidak hanya pada variabel dependen dan independen, tetapi juga dapat menambahkan variabel pemoderasi atau intervening berupa *timeliness* dan *timepressure*.

### DAFTAR RUJUKAN

- Alimbudiono, R.S., dan A.A. Fidelis. 2004. Kesiapan Sumber Daya Manusia Sub Bagian Akuntansi Pemerintah Daerah "XYZ" dan Kaitannya dengan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah kepada Masyarakat: Renungan Bagi Akuntan Pendidik. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*, vol. 05, no. 02, hal: 18–30.
- Andriani, W. 2010. Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, vol. 5, no. 1.
- Aritonang, A.S., dan F. Syarif. 2009. Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 pada Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 12. Diunduh dari (<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/9738/1/10E00271.pdf>).
- Bastian, I. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik. 2006.<sup>15</sup>*Standar Akuntansi Pemerintahan: Telaah Kritis PP Nomor 24 Tahun 2005*. Yogyakarta: BPFE.
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Cetakan IV Penerbit UNDIP.
- Indriantoro, N., dan B. Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Indriasari, D., dan E. Nahartyo. 2008. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir)*. Simposium Nasional Akuntansi XI. Pontianak.
- Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan RI. 2005. *Kelemahan Desain dan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal*. [www.itjen.depkeu.go.id](http://www.itjen.depkeu.go.id)
- . 2006. *Peran Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan terkait dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)*.
- Karmila, A.T., dan E. Darlis. 2013. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Provinsi Riau). *Jurnal Sorot*, Vol. 09, no. 1. Riau.
- Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik*. UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M., F. Sulistiyowati, dan H.A.Purwanugraha. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.

- Marda, G.S. 2013. *Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai*. Skripsi. UR.
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- . 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.
- . *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- . *Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah*.
- . *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- . *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Sari, S.P., dan B. Witono. 2014. *Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Daerah Ditinjau dari Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi*. Sancall. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sekaran, U. 2003. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Singarimbun, M. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3S.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Winidyaningrum dan Rahmawati. 2010. *Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris di Pemda Subosukawonosraten)*. Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto.
- Wahana Komputer. 2003. *Panduan Aplikatif Sistem Akuntansi Online Berbasis Komputer*. Yogyakarta: ANDI.
- Wansyah, H., Darwanis, dan U. Bakar. 2012. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kegiatan Pengendalian terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan SKPD pada Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 01, no. 01.
- Wilkinson, W., Joseph, M.J., Cerullo, Vasant Raval, dan B. Wong-On-Wing. 2000. *Accounting Information Systems: Essential Concepts and Applications*. John Wiley and Sons.Inc.